

Kebijakan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kecamatan Rupert Utara

¹Harry Nainggolan, ²Nurjanah, ³Yasir

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Korespondensi : harrynainggolan21@yahoo.com

Abstrak

Rupert Utara memiliki potensi wisata bahari dan budaya yang sangat indah. Potensi ini didukung oleh kebijakan Pemerintah Pusat dengan menetapkan Pulau Rupert Utara sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sementara itu Pemerintahan Bengkalis juga telah menetapkan Rupert Utara sebagai pusat pembangunan pariwisata unggulan daerah didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 yang merupakan visi dan misi Bupati Bengkalis Amril Mukminin, SE,MM untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui perspektif kebijakan komunikasi, melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi, studi literatur dan kelompok fokus, dengan menggunakan teknik analisa data Huberman Miles. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pariwisata di Kecamatan Rupert Utara berorientasi pada wisata bahari sebagai unggulan dengan didukung wisata budaya, dan wisata kuliner khas melayu sesuai branding yang ditetapkan oleh Pemerintahan Bengkalis sebagai Pariwisata Melayu Bahari. Dalam implementasi kebijakan komunikasi yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang masih terkonsentrasi pada belum optimalnya komunikasi, lemahnya koordinasi dan sinkronisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran sehingga pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupert Utara masih bersifat ego sektoral dan jauh dari target RPJMD Kabupaten, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) yang telah ditetapkan sejak 2016 yang lalu.

Kata kunci: Kebijakan Komunikasi, Komunikasi Pariwisata, Komunikasi Pemerintahan

Abstract

North Rupert has the potential for marine and cultural tourism which is very beautiful. This potential is supported by the central government policy of establishing North Rupert islands as a National Tourism Strategic Area (KSPN). Mean while, the Bengkalis Government has also designated North Rupert as the center of regional superior tourism development ini the mid term development plan regional (RPJMD) Bengkalis Regency for the period 2016-2021 which is the vision and mission of the Regent Bengkalis Amril Mukminin, SE,MM to manifest prosperity the people. The Research uses qualitative methods through a communication policy perspective, through data collection techniques interviews, observations, literature studies and focus groups, using data analysis techniques Huberman Miles. The results of this study explain that tourism in North Rupert is oriented towards marine tourism as a superior supported by cultural tourism and culinary tourism typical of Malay according to the branding set by The Bengkalis Government as Malay Tourism Marine. In implementing the communication policy that has been carried out, the District Government of Bengkalis has several supporting factors and in habiting factors which are still concentrated on not optimal communication, weak coordination and synchronization, limited human resources and budget availability so that tourism development in North Rupert is still sectoral ego and far form the target of the district RPJMD, the Strategic Plan (RENSTRA) of the tourism office and the national tourism development master plan (RIPPARNAS) which has been established since 2016 ago.

Keyword: Communication Policy, Tourism Communication, Government Communication

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Untuk mewujudkan keberhasilan pengembangan pariwisata tersebut tentunya memerlukan proses perencanaan yang harus melibatkan antara lain pelaku, proses penyelenggaraan, kebijakan, politik, dan sosial budaya yang saling berinteraksi, dan akan lebih realistis bila dilihat sebagai sistem dengan berbagai subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi (Ernststeins, 2011). Pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat lokal.

Keberhasilan pengembangan pariwisata ditentukan oleh kebijakan komunikasi pemerintahan yang akan menjawab persoalan ego sektoral. Dalam hal ini, penyusunan kebijakan komunikasi harus mempertimbangkan keserasian program nasional yang memerlukan dukungan komunikasi yang menyeluruh dan berkelanjutan (Cangara, 2013). Menurut Beach dalam Silalahi (2004) menekankan bahwa bagaimanapun juga organisasi pemerintahan tidak akan dapat melaksanakan fungsinya, dan tidak akan dapat mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan sumber-sumbernya, dan pada akhirnya tidak akan dapat mencapai tujuannya tanpa komunikasi.

Salah satu potensi wisata yang sedang digenjot pengembangannya oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis adalah wisata bahari yang terdapat di Pantai Rupert Utara. Strategi dan kebijakan pembangunan wilayah sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 menetapkan pembangunan pusat pariwisata di Kecamatan Rupert Utara sebagai bagian prioritas dan pendukung yang akan dicapai dari misi Bupati Bengkalis bapak Amril Mukminin, SE,MM untuk mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat yang pada akhirnya mensukseskan visi Kabupaten Bengkalis pada periode perencanaan pembangunan jangka menengah 2016-2021 yakni “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Junjungan Maju dan Makmur di Indonesia”.

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bengkalis juga sejalan dalam Peraturan Pemerintah RI (PP) nomor 50 tahun 2011 pasal 2 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional (RIPARNAS) 2010 – 2025 yaitu untuk mensukseskan Visi Pembangunan Kepariwisata Nasional “Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata kelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat”. Adapun untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Pusat menetapkan Pulau Rupert Utara sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupert Utara tentunya perlu penanganan komunikasi yang terencana dan terintegrasi yang melibatkan pengambilan keputusan, pengendalian dan penetapan alokasi sumber-sumber daya komunikasi secara logis untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mempunyai prospek yang baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

Pada artikel ini, peneliti akan membahas potensi pariwisata yang ada di Kecamatan Rupert Utara, Kebijakan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Rupert Utara, Implementasi Kebijakan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam pengembangan Pariwisata di Kecamatan Rupert Utara dan faktor pendukung dan penghambat dalam proses kebijakan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupert Utara.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui perspektif kebijakan. Pemilihan metode kualitatif karena informasi penelitian harus digali secara mendalam agar mampu mengangkat jawaban yang dicari atas permasalahan yang diteliti. Metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman atau kualitas data bukan banyaknya kuantitas data (Kriyantono,2010:58).

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian berfokus pada data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis, Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, dan Para Kepala Desa disekita objek wisata Pulau Rupa Utara. penulis juga melakukan observasi lapangan untuk melihat secara rill kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Rupa Utara dalam pengembangan pariwisata. Studi literatur dan dokumen untuk melengkapi data penelitian diambil melalui website pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Adapun informan penelitian ini yaitu H. Anharizal, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis, Sofyan, S.Pd dari sebagai Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Feri Situmeang Anggota DPRD Bengkalis Daerah Pemilihan Rupa-Rupa Utara, Ahmad Tarmizi, S.Ag, M.IP Sekcam Rupa Utara, Mansur Kades Teluk Rhu, Panut, S.Pd Kades Puteri Sembilan, Asri Kades Tanjung Punak. Peneliti juga mewawancarai informan dari unsur Pelaku usaha Pariwisata, dan Tokoh Masyarakat Rupa Utara.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman, dimana analisis data penelitian kualitatif dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan verifikasi data sebagai proses untuk menemukan pola atau tema-tema, dan mencari hubungan antara kategori yang telah ditemukan dari hasil pengumpulan data (Afrizal, 2014).

Adapun yang menjadi argumentasi peneliti sehingga memilih Rupa Utara sebagai fokus penelitian adalah, karena Pulau Rupa memiliki potensi besar dibidang pariwisata yang selama ini bagai surga tersembunyi di ujung Kabupaten Bengkalis. Panorama Alam pantai Pulau Rupa masih sangat alami dan sangat eksotis, namun sayangnya pengembangannya belum tergarap dengan maksimal, sementara selama ini Kabupaten Bengkalis memiliki APBD yang besar namun tidak termanfaatkan untuk pengelolaan pariwisata di Rupa Utara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun pada hasil dan pembahasan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut, Potensi Objek Wisata di Rupa Utara, Kebijakan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Rupa Utara, Implementasi Kebijakan dan Faktor Pendukung serta Penghambat dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupa Utara.

Potensi Objek Wisata di Kecamatan Rupa Utara

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Riau yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata, kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang berhadapan langsung dengan pelayaran internasional, yaitu Selat Malaka dan berada dalam kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura dan Indonesia-Malaysia-Thailand (Indonesia *Ecotourism Network*, 2002) memiliki potensi besar untuk pengembangan sebagai destinasi wisata unggulan, seperti Pantai Rupa Utara.

Pariwisata di Kecamatan Rupa Utara berorientasi pada wisata bahari sebagai unggulan dengan didukung wisata budaya, dan wisata rekreasi atau kuliner khas melayu. Tradisi budaya Melayu dengan

keramah-tamahan masyarakatnya dengan dicampur beberapa tradisi suku Jawa dan etnis Tionghoa mendukung destinasi wisata pantai yang indah. Sehingga *branding* yang ingin ditanamkan di benak khalayak adalah “Melayu Bahari”.

1. Objek wisata pantai Pesona Desa Teluk Rhu.
Pantai Pesona boleh dikatakan mirip dengan Pantai Sanur di timur Bali dengan pasir putih yang terbentang luas, sehingga bisa dimanfaatkan untuk voli pantai dan cocok untuk berjemur, berenang, menyelam, bahkan berselancar. Jika kondisi cuaca bagus di malam hari, akan terlihat cahaya-cahaya lampu di Port Dickson Malaysia. Sambil menikmati suasana pantai yang tenang, nyaman dan memesona pengunjung dapat beramah tamah dengan para nelayan di sekitar pantai yang sedang memperbaiki jala atau nelayan yang akan pergi mencari ikan ke laut, akan tampak kesibukan nelayan yang sedang melaut di pantai tersebut.
2. Objek wisata pantai Tanjung Lapin Desa Tanjung Punak
Kawasan Pantai Tanjung Lapin memiliki pantai yang landai, halus dan Putih, dengan panjang pantai sejauh ±17 Km dengan bentangan pantai seluas 300 Meter dari bibir pantai. Pantai ini memiliki gelombang yang stabil, tidak lebih dari 1 meter. Di wilayah pantai ini setiap tahunnya diadakan acara Pesta Pantai dan Lomba Perahu Jong, Gasing dan Layang.
3. Objek wisata pantai Beting Aceh Desa Suka Damai
Pulau ini adalah pulau kecil unik dengan pasir pantai berbisik yang berbunyi jika disentuh. Saat air laut surut, pulau yang bersebelahan dengan Pulau Babi itu akan menciptakan daratan pasir seluas lapangan bola. Pulau yang tidak berpenghuni tersebut muncul akibat adanya sedimentasi air laut yang membawa pasir menumpuk hingga menjadi pulau. Untuk menuju lokasi pulau Betting Aceh membutuhkan waktu sekitar 20 menit dari Pulau Rupat Utara dengan menggunakan *speed boat* yang bisa kita sewa dari warga setempat.
4. Objek wisata sejarah dan budaya Makam Puteri Sembilan Desa Puteri Sembilan
Makam puteri Sembilan berada di Dusun Parit Baru Desa Puteri Sembilan. Konon cerita masyarakat makam ini disemayamkan 9 puteri yang lari dari pembesar zalim yang berkuasa.
5. Festival Mandi Safar
Masyarakat Rupat Utara mempunyai suatu budaya yang khas dan unik yang diperingati setiap tahunnya. Salah satunya adalah kegiatan Mandi Safar yang dilakukan pada bulan safar. Budaya ritual mandi safar dipercaya masyarakat setempat mampu menumbuhkan nilai-nilai kesetiakawanan, nasionalisme, cinta terhadap budaya, bertoleransi tinggi dan mampu mempererat tali silaturahmi. Prosesi ritual mandi safar itu sendiri, diawali dengan iring-iringan delapan pasang anak-anak yang akan dimandikan, menuju sumur tua yang berada di Desa Tanjung Punak. Sebelum dimandikan, terlebih dahulu dilakukan tepuk tepung tawar, kemudian dengan menggunakan gayung berbahan kayu dan tempurung kelapa ke delapan pasang anak-anak tersebut dimandikan secara bergantian. Tradisi mandi safar ini telah ada sejak tahun 1920-an.
6. Festival Tarian Zapin Api
Tari zapin api ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia 2017 dari Provinsi Riau. Tarian ini penuh magis dan mistik. Sajian tarian ini hanya ada di Pulau Rupat Utara, Bengkalis, Riau. Tari zapin merupakan salah satu budaya Riau berupa tarian yang diiringin musik melayu. Jika hal ini cukup mainstream, maka berbeda dengan budaya Riau yang satu ini. Zapin api, mengharuskan para penarinya untuk bergoyang ditengah bara api. Menariknya, para penari sama sekali tidak merasa panas. Mereka justru terlihat begitu menikmati tarian dan seolah sedang bermain ditengah api yang semakin membara.

7. Hutan Mangrove Desa Tanjung Medang

Kawasan Hutan Mangrove Desa Tanjung Medang merupakan Kawasan yang dipersiapkan untuk memperkaya destinasi wisata di Kecamatan Rupert Utara. Berada di pesisir Barat Pulau Rupert dan berhadapan langsung dengan Pulau Beting Aceh dapat dijadikan sebagai alternatif. Salah satu potensinya adalah wisata alam berupa hutan mangrove yang masih asri dan wisata pancing.

8. Pantai Bestari

Tidak kalah dengan pantai lainnya di Kecamatan Rupert Utara ini juga menyimpan pesona tersendiri. di Ujung pantai terdapat tanjung dan teluk di pangkalnya memberikan pemandangan panoramik sehingga cantik dijadikan objek fotografi. Pantai ini terletak di Dusun Pasir Putih Desa Puteri Sembilan.

Namun hasil observasi peneliti terhadap kondisi riil dilapangan terhadap pengembangan masing-masing objek wisata diatas masih jauh dari target RPJMD yang telah disusun. Dilihat perkembangan Kawasan Wisata Rupert Utara saat ini dapat dikatakan berjalan lambat. Kondisi tempat objek wisata masih minim penataan, mulai sarana prasarana, kebersihan, dan kenyamanannya. Misalnya, wisata dipantai Lapin banyak bangunan Pemda sebagai sarana pendukung terbengkalai, rusak dan tidak difungsikan. Tidak adanya penataan kios untuk tempat masyarakat berjualan, sehingga pengunjung sulit untuk membeli makan dan minuman, oleh-oleh dan souvenir khas daerah Pantai Lapin.

Temuan lain yang peneliti dapatkan lewat kegiatan observasi di tempat objek wisata diatas adalah, pengelolaan yang belum dilakukan secara profesional dan cenderung sederhana,. Misalnya, pengelolaan *homestay* yang masih belum menimbulkan kesan nyaman bagi pengunjung. *Homestay* belum dipasang ac, kebersihan belum terjaga dan belum tersedianya sarapan pagi bagi tamu. Masih minimnya sarana permainan pantai, memang sudah ada sarana permainan seperti *ATV, Banana Boat, dan speed* tetapi jumlahnya masih terbatas, kondisi ini menyebabkan pengunjung harus antri bila ingin menyewanya.

Temuan lain yang peneliti dapatkan adalah masih minimnya sarana wisata pendukung untuk melayani kebutuhan pengunjung dalam menikmati perjalanan wisatanya, seperti; belum adanya pusat perbelanjaan modern, belum adanya biro perjalanan wisata, belum adanya restoran, jasa perbankan yang ada masih bank BRI dan Bank Riau. Kondisi ini tentunya menyebabkan wisatawan yang datang berkunjung ke Rupert Utara tidak akan betah dan nyaman untuk berwisata. Rendahnya kunjungan wisatawan pada akhirnya menyebabkan kurangnya motivasi masyarakat untuk mendukung pengembangan usaha pariwisata.

Kebijakan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Rupert Utara.

Kebijakan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam Pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupert Utara menyesuaikan pada ketentuan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau, yakni sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah RI nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata nasional (RIPARNAS) 2010-2025, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Riau (RIPPDA) sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2004 dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Bengkalis Amril Mukminin, S.E, MM bersama wakil Bupati H. Muhammad, ST, MT tentang arah dan strategi pembangunan Kabupaten Bengkalis lima tahun menjabat. Dengan adanya kebijakan tersebut, Pulau Rupert Utara telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) serta Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Kebijakan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pengembangan Pariwisata telah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis

yaitu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan, bidang Kepemudaan dan Olahraga. Dinas ini selanjutnya berperan sebagai implementor kebijakan. Sebagai persiapan dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupert Utara, Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis melakukan interpretasi, yaitu merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih abstrak dari visi Bupati Bengkalis tentang pembangunan kawasan pariwisata unggulan daerah di Kecamatan Rupert Utara kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Selanjutnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis menyusun kebijakan umum atau kebijakan strategis yang akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial dan kemudian selanjutnya akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional.

Aktivitas interpretasi kebijakan tadi, tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), DPRD, Pemerintah Desa sekitar objek wisata, Pelaku Usaha Pariwisata dan Masyarakat agar supaya seluruh mitra kerja Dinas Pariwisata dapat mengetahui, memahami dan mendukung apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran dari kebijakan yang telah disusun untuk keberhasilan dalam mewujudkan visi Bupati Bengkalis didalam pembangunan pariwisata di kecamatan Rupert Utara.

Adapun yang menjadi isi dari kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis yang telah diselaraskan dengan kebijakan pembangunan pariwisata Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Pariwisata yaitu “Mewujudkan Pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumberdaya manusia untuk kemakmuran rakyat” yang akan dilakukan dengan melaksanakan program pengembangan Destinasi Pariwisata yang bedaya saing, Pengembangan Pemasaran Wisata secara sinergis, unggul, dan berdaya saing, Pengembangan Kemitraan Pariwisata, produk dan layanan pariwisata yang berdaya saing internasional, Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan Keragaman Budaya, dan Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan. Seluruh isi kebijakan tersebut disusun didalam sebuah Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021.

Hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap proses Kebijakan Komunikasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini yang dilakukan Dinas Pariwisata menunjukkan bahwa kebijakan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sangat formalistik dan hanya berpedoman pada aturan-aturan yang ada, mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau dan kegiatan yang monoton.

Implementasi Kebijakan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Rupert Utara.

Di analisis menggunakan model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), serta ditautkan dengan teori Komunikasi Organisasi, Teori Komunikasi Pemerintahan dan Teori Kepariwisata. Van Metter dan Van Horn menyampaikan ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu:

1. Tujuan Kebijakan Komunikasi

Program kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis dalam Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Rupert Utara merupakan upaya yang bertujuan untuk mensukseskan visi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis periode 2016 – 2021 yakni “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”. Didalam memahami tujuan dari pada visi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis untuk Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Rupert Utara, Dinas Pariwisata Bengkalis telah melakukan akselerasi seluruh program dan kegiatan dengan mempedomani Rencana Strategis Kementerian dan Renstra perangkat daerah di Provinsi Riau agar terjadi sinkronisasi antara kegiatan yang diusulkan dengan agenda pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Riau, namun hasil penelitian dan

kondisi dilapangan membuktikan hanya bersifat program kebijakan diatas kertas, belum sepenuhnya menyentuh kualitas dan kuantitas pembangunan di Rupert Utara. Belum ada keselarasan dan keseriusan dari Pemerintah Provinsi Riau, dan Kementerian Pariwisata antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dari kebijakan yang telah dibuat. Pariwisata di Kecamatan Rupert Utara beberapa tahun lalu sudah ditetapkan sebagai KSPN, cuma ditetapkan saja. Kegiatan untuk menunjang kegiatan itu cukup lamban. Tidak ada kegiatan yang signifikan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Pariwisata didalam pembangunan pariwisata di Rupert Utara.

2. Sumber Daya

Sumber daya di Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis dapat disimpulkan belum optimal. Berbagai persoalan sumber daya menjadi faktor lambannya pengembangan pariwisata di Pulau Rupert Utara, yakni : *Pertama*, persoalan Sumber Daya Manusianya. Dari sisi *skill* (kemampuan atau kompetensi) pelaksana kebijakan, terdapat permasalahan pada kurangnya kompetensi pelaksana kebijakan, terutama dari sisi konsep makro kebijakan. Masih banyak yang belum memahami tentang implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, inkompetensi terjadi karena latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja pegawai yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya saat ini. *Kedua*, faktor terbatasnya anggaran menjadi penyebab lambatnya program kebijakan pengembangan pariwisata di Pulau Rupert Utara. Sampai saat ini Dinas Pariwisata Bengkalis hanya menggunakan anggaran yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkalis. *Ketiga*, masih rendahnya daya saing unit bisnis kepariwisataan di Kabupaten Bengkalis. Kelemahan tersebut menyangkut masalah manajemen produk, kurangnya sajian atraksi pariwisata dan masih belum maksimalnya pemasaran pariwisata. *Keempat*, masih terbatasnya kondisi fasilitas sarana dan infrastruktur di Pulau Rupert Utara.

3. Karakteristik dari Pelaksana

Untuk faktor ini sudah cukup baik, karena dalam menjalankan program ini masing-masing pelaksana yang terlibat dalam pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab telah diatur dalam ketentuan Peraturan, baik Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Bengkalis. Masing-masing pelaksana memiliki struktur organisasi tersendiri didalam pelaksanaan program sesuai ketentuan peraturan yang mengatur organisasi tersebut.

4. Sikap atau Disposisi Para Pelaksana

Secara umum persepsi pegawai di Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis adalah mendukung dan melaksanakan tugasnya dan patuh akan perintah Kepala Dinas walau dapat dikatakan belum optimal, karena disebabkan penetapan pegawai yang terjadi di bidang pariwisata masih kurang memiliki keahlian khusus di bidang pariwisata sehingga pemahaman dibidang pariwisata kurang dimiliki pegawai. Para pelaksana di Dinas Pariwisata sebenarnya juga telah berupaya dan cukup aktif mengoordinasikan semua hal teknis terkait implementasi kebijakan yang melibatkan badan atau organisasi pelaksana lainnya. Koordinasi vertikal dan horizontal telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, namun kebijakan pariwisata belum mencerminkan *political will* karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau belum meniadakan rencana pengembangan pariwisata yang telah disusun dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Riau secara serius, rencana yang telah dibuat masih sekedar wacana dan jauh dari target yang telah dibuat.

5. Komunikasi Pemerintahan

Kebijakan Komunikasi dalam pengembangan Pulau Rupat sebagai destinasi wisata utama di Kabupaten Bengkalis cenderung dilakukan searah, bukan timbal balik. Komunikasinya bersifat *top down*. Komunikasi pemerintahan yang terjadi antar perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pengembangan pariwisata cenderung didominasi oleh komunikasi vertikal (*vertikal communication*) dengan aliran informasi dari atas ke bawah (*downward communication*) berdasarkan hubungan kekuasaan (*power relationship*) dalam hierarki. Komunikasi yang dijalin Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya tidak diarahkan pada penyamaan persepsi atau *mutual understanding* tentang suatu kegiatan atau program yang berkaitan dengan agenda pariwisata tetapi sebatas informasi sepihak. Komunikasi yang terjadi juga kurang fleksibel di antara para pejabat administrator dan pengawas antar perangkat daerah terkait. Dari sisi kebijakan komunikasi pemasaran yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis terhadap promosi objek wisata Pulau Rupat Utara sudah baik, karena dilakukan secara kontiniu dan berkelanjutan.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi biaya ekonomi di Pulau Rupat Utara terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan destinasi wisata lain yang ada di Kabupaten Bengkalis atau daerah daratan tetangga seperti Kota Dumai. Harga barang-barang kebutuhan, Akomodasi, Transportasi, BBM di Kecamatan Rupat Utara lumayan tinggi. Hal ini dikarenakan barang-barang yang dikonsumsi sebagian besar diambil dari luar daerah maupun negara seperti Dumai, Bengkalis dan Malaysia. Selain karena harus melalui jalur penyebrangan laut, jarak yang jauh antara Rupat Utara dengan Dumai dan Bengkalis serta keadaan infrastruktur yang kurang memadai membuat harga barang-barang tersebut relatif tinggi. Kondisi APBD Bengkalis sejak tahun 2017 yang mengalami penurunan juga berdampak pada penganggaran di Dinas Pariwisata. Akibat defisit anggaran ini berdampak pada penundaan kegiatan pembangunan pariwisata di Pulau Rupat termasuk pada kegiatan pembangunan infrastruktur jalan yang sampai tahun 2020. Aspek kehidupan sosial dan budaya juga mendukung untuk pengembangan pariwisata di Pulau Rupat Utara. Kondisi politik masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya Kecamatan Rupat Utara relatif stabil terbukti tidak pernah terjadinya demo maupun kerusuhan. Bahkan dengan adanya visi bupati yang pro investor dapat dikatakan kondisi politik di Kabupaten Bengkalis mendukung perkembangan kepariwisataan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang masih terkonsentrasi pada koordinasi dan sinkronisasi, sumber daya dan ketersediaan sumber dana sehingga implementasi kebijakan komunikasi dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupat Utara masih bersifat ego sektoral dan jauh dari target RPJMD Kabupaten, RENSTRA Dinas Pariwisata dan RIPPARNAS yang telah ditetapkan sejak 2016 yang lalu.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa Kebijakan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Rupat Utara menyesuaikan pada ketentuan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau. Komunikasi pemerintahan yang terjadi antar perangkat daerah di lingkup

Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pengembangan pariwisata cenderung didominasi oleh komunikasi vertikal (*vertikal communication*) dengan aliran informasi dari atas ke bawah (*downward communication*) berdasarkan hubungan kekuasaan (*power relationship*) dalam hierarki. Pariwisata di Kecamatan Rupert Utara berorientasi pada wisata bahari sebagai unggulan dengan didukung wisata budaya, dan wisata rekreasi atau kuliner khas melayu. Belum ada keselarasan dan keseriusan dari Pemerintah Provinsi Riau, dan Kementerian Pariwisata antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dari kebijakan yang telah dibuat. Tidak ada kegiatan yang signifikan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Pariwisata didalam pembangunan pariwisata di Rupert Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amri, K., Wahidar, T. I., Fuadi, A., Habibie, D. K., & Meiwanda, G. (2022). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Niara*, 15(2), 379-387.
- [2] Argenti, Paul. 2009. *Corporate Communication*. Penerjemah Putri Aila Idris. *Komunikasi Korporat*. Jakarta : Salemba Humanika
- [3] Aritonang, A. I. (2011). Kebijakan Komunikasi di Indonesia : *Jurnal Komunikasi*, 1(3), 261–286.
- [4] Anonim. 2016. *Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis*.
- [5] Abiding, Y.Z. (2015). *Manajemen Komunikasi (Filosofi, Konsep, dan Aplikasi)*. Bandung : Pustaka Setia
- [6] Abrar, Ana Nadya, 2008, *Kebijakan Komunikasi : Konsep, Hakekat dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- [7] Burhan, B. (2015). *Komunikasi Pariwisata: Pemasaran dan Brand Destinasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- [8] Eka, Eka, Trio Saputra, and Aguswan Aguswan. "Pengembangan obyek wisata di Kawasan Danau Buatan PLTA Koto Panjang." *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial* 1.1 (2020): 34-41.
- [9] Nurjanah, N., Firdaus, M., Samsir, S., & Awza, R. (2020). Model Pengelolaan Komunikasi Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Di Kawasan Pariwisata Rupert Utara. *Jurnal Riset Komunikasi*, 3(2), 239-253.
- [10] Rizki, S. M., & Yuliani, F. (2017). *Strategi Dinas Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata Pantai Pesona Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis* (Doctoral dissertation, Riau University).